

Analisis Diplomasi *Soft Power Denmark* Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)

An Analysis of Denmark's Soft Power Diplomacy in Indonesia

(A Study on Environmental Management Cooperation in Indonesia)

Septyanto Galan Prakoso*, Nadia Dian Ardita*, Andriyansyah Perdana Murtyantoro*

*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

email: septyantogalan@yahoo.com

Riwayat Artikel

Diterima 15 Maret 2019

Direvisi 21 April 2019

Disetujui 2 Mei 2019

Abstract

Global warming is one of the key issues of the century. The cause of this particular phenomenon is that most economic activities have been carried out by many countries without due consideration of sustainability and the environment. Due to the lack of awareness of both aspects, the Earth's temperature is getting warmer over the past few years and the long-term effect of such trend is that the sea level has started to rise. Coastal countries start to witness its impacts and some of them have already taken several actions to address this problem. Among the few countries that are determined to take serious measures to address this issue is Denmark. Through its Ministry of Foreign Affairs, Denmark has worked in cooperation/collaboration with countries that have contributed to this environmental problem in slowing down the phase of global warming by looking directly at its source. In response to this situation, back in November 2017, Denmark's Prime Minister Lars Løkke Rasmussen visited Jakarta to discuss issues of Denmark's interest in Indonesia, especially about environmental issue in Indonesia. The meeting was marked by a commitment of strengthened relations between two countries, and an exchange of gifts between both leaders. This study aims to find out the reasons why Denmark wanted to cooperate with Indonesia in surmounting environmental problems, and what actions the Danish government has taken to decrease the rate of pollution in Indonesia through the adoption of the National Interest concept. Towards the end, this article shows that Denmark has built several green facilities in order to decrease the pollution level, which partially comes from Indonesia.

Keywords: Indonesia-Denmark; green diplomacy; cooperation.

Abstrak

Pemanasan global merupakan isu yang penting pada abad ini. Sumber dari terjadinya fenomena ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai akibat dari kurangnya aspek-aspek tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan dampak jangka panjang yaitu naiknya permukaan air laut. Negara-negara pesisir mulai merasakan dampak dan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi isu lingkungan ini. Denmark menjadi salah satu negara yang berkeinginan untuk mengatasi masalah ini. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Denmark telah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi kontributor penyebab masalah lingkungan ini dengan tujuan untuk memperlambat laju pemanasan global. Melihat situasi ini, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk membahas kepentingan nasional Denmark terhadap Indonesia, khususnya mengenai isu lingkungan hidup. Pertemuan ini ditandai dengan pemberian hadiah diplomatik antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Denmark ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan serta tindakan apa yang pemerintah Denmark lakukan dalam mengurangi tingkat polusi di Indonesia dengan menggunakan konsep *National Interest*. Bagian terakhir jurnal ini menunjukkan hasil konkrit kerja sama Indonesia-Denmark yaitu dibangunnya fasilitas-fasilitas yang berorientasi Hijau untuk mengurangi polusi yang sebagian dihasilkan oleh Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia-Denmark; diplomasi hijau; kerja sama.

Pendahuluan

Denmark dan Indonesia merupakan negara yang telah mengadakan hubungan diplomatik dan kerja sama sejak 1950 dan telah berjalan dengan baik. Baik Indonesia maupun Denmark menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta hubungan bilateral didasarkan atas kemitraan yang sejajar sebagai sesama negara yang berdaulat. Kerja sama yang dilakukan antara lain dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hubungan Indonesia dengan Denmark semakin erat ketika reformasi terjadi di Indonesia tahun 1997. Denmark mendukung demokratisasi di Indonesia melalui skema kerja sama pembangunan (*Danish International Development Agency/DANIDA*). Beberapa tahun terakhir, pemerintah Denmark memandang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penting di kawasan Asia yang memiliki sumber daya potensial. Sejak tahun 1950, kunjungan kenegaraan oleh Ratu Margrethe II beserta Pangeran Consort Henrik dilakukan pertama kali pada tanggal 21-24 Oktober 2015 yang bersamaan dengan momentum 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.¹ Menurut Menteri Luar negeri Denmark, Kristian Jensen, kunjungan kenegaraan ini dilakukan dengan dasar untuk memperkuat kerja sama, mencakup perdagangan, pengembangan, budaya, politik, interaksi bisnis dan organisasi non-pemerintah.² Selain itu, Menteri Luar Negeri Denmark juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan pemain kunci di Asia serta memiliki kapasitas di ASEAN yang kemudian membuat pemerintah Denmark ingin memiliki aliansi kerja sama yang lebih

1 Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Sekilas Info tentang Denmark," *Kementerian Luar Negeri Indonesia*, 2017, diakses 27 Desember 2017, <https://www.kemlu.go.id/copenhagen/id/Pages/Denmark.aspx>

2 Yohanna Ririhena, "Bright future seen for Indonesian-Danish relations," *The Jakarta Post*, 9 Oktober 2015, diakses 31 Maret 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/09/bright-future-seen-indonesian-danish-relations.html>

kuat dan membangun hubungan yang lebih kuat di seluruh Asia Tenggara.³

Tahun 2017 Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengunjungi Indonesia tepatnya di Istana Bogor pada tanggal 28 November 2017 dengan membawakan hadiah diplomatik berupa piringan hitam band Metallica. Kesukaan Presiden Joko Widodo terhadap band Metallica membuat Perdana Menteri Denmark semakin tertarik untuk mengenal lebih jauh sosok Joko Widodo. Pemberian hadiah tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik. Presiden Joko Widodo kemudian membalasnya dengan memberikan Rencong, senjata khas dari Aceh. Kunjungan tersebut dalam dunia hubungan internasional tidak semata-mata hanya kunjungan biasa belaka karena setiap kunjungan yang dilakukan pastinya terdapat pembahasan tertentu. Seperti pada kunjungan pertama kali oleh Ratu Denmark, kedua negara menghasilkan empat bentuk kerja sama, yaitu dialog antarumat beragama, energi terbarukan, kemaritiman, dan pendidikan. Namun, tidak setiap kunjungan beserta pembahasan yang dilakukan antar aktor diplomasi dipublikasikan kepada publik secara utuh karena untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing pihak. Pemberian hadiah diplomatik dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk melancarkan pembahasan diplomatik yang dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Denmark. Salah satunya Denmark menginginkan adanya pengembangan program hijau dengan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim, mendukung energi terbarukan dan efisiensi energi. Denmark sejak tahun 1973 ketika krisis minyak terjadi, telah menikmati pasokan energi yang terjamin karena adanya penguatan mendasar dari sistem energi yang diterapkan, integrasi kebijakan energi ramah lingkungan, serta kemajuan

3 Ririhena, "Bright future seen."

menuju efisiensi energi dengan langkah-langkah penghematan.⁴ Hal ini kemudian membuat Denmark berkomitmen untuk menetapkan target 30% energi terbarukan pada tahun 2025 dalam berbagai sumber energi negaranya.⁵ Pada tahun 1990, hampir 1 kg karbon dioksida dikeluarkan untuk setiap kWh listrik yang diproduksi di Denmark. Namun pada tahun 2012 Denmark hanya memancarkan kurang dari 300 g.⁶ Integrasi energi angin yang tinggi, meluasnya penggunaan biomassa, dan penerapan sistem pajak energi lingkungan progresif telah mendukung anggapan Denmark sebagai 'negara hijau'.⁷ Klok et. al dalam Sovacool menyatakan bahwa Denmark dapat dikatakan sebagai negara 'gelombang pertama yang menerapkan pajak lingkungan dan *Ecological Tax Reform* (Reformasi Pajak Ekologi) dibandingkan dengan negara-negara lain.⁸

Dengan melihat keadaan domestik yang ada di Denmark melalui penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan masalah lingkungan, tentunya kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Denmark akan memberikan timbal balik bagi kedua negara. Dampak yang dirasakan bagi negara juga tentunya akan meluas bagi masyarakat maupun aktor-aktor lain yang terlibat dalam kerja sama. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana Denmark dapat mencapai kepentingan nasionalnya di Indonesia khususnya melalui bidang lingkungan hidup. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau, teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, serta menggunakan konsep *soft-power diplomacy* dengan melihat realitas kontemporer yang terjadi akibat perkembangan

informasi dan teknologi. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan dinamika hubungan diplomatik dan kerja sama yang telah terjalin antara Denmark dan Indonesia sejak tahun 1950.

Konsep Teori

Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional merupakan teori yang lahir dari pendekatan realisme yang dicetuskan oleh Hans J. Morgenthau. Keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Kepentingan nasional diartikan sebagai kemampuan negara bangsa untuk melindungi identitas fisik, identitas politik, dan identitas kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain dengan mengabaikan nilai moral universal yang ada. Morgenthau juga beranggapan bahwa negara merupakan aktor yang paling utama dalam melaksanakan dan melindungi kepentingan nasional dan menganggap bahwa individu, organisasi internasional, maupun aktor lainnya kurang penting untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan nasional. Namun seiring perkembangan zaman, dibutuhkan interaksi yang tetap memerhatikan nilai moral universal, sehingga muncullah pemikir kaum neorealis. Kenneth Waltz, pemikir kaum neorealis terkemuka mengungkapkan bahwa struktur sistem internasional merupakan titik fokus dalam menganalisis sebuah interaksi antar negara. Neorealisme menurut Waltz kurang lebih membuat aturan-aturan mengenai ketatanegaraan dan diplomasi. Negara melalui pemimpinnya merupakan aktor rasional memiliki strategi dan kelihaihan dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya.⁹

4 Ranjan Parajuli, "Looking into the Danish energy system: Lesson to be learned," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16, no. (2012): 2191-2199.

5 Parajuli, "Looking into the Danish energy system."

6 Benjamin K. Sovacool, "Energy policymaking in Denmark: Implications for global energy," *Energy Policy* 61, 2013: 829-839.

7 Sovacool, "Energy policymaking in Denmark."

8 Sovacool, "Energy policymaking in Denmark."

9 Heydarian Pashakhanlou, Arash, "Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism: A Re-examination of Hans Morgenthau's and Kenneth Waltz's Theories of International Relations". *E-international relations student online article*, 23 Juli 2009

Soft Power Diplomacy

Menurut Joseph S. Nye, secara tradisional kekuatan sebuah negara dalam kancah internasional merupakan kekuatan militer yang menjadi kekuatan utama yang harus dimiliki. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kekuatan saat ini tidak ditekankan pada kekuatan tradisional saja. Faktor teknologi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah kekuatan signifikan dalam kancah internasional. Sehingga, faktor geografi, jumlah populasi, dan sumber daya alam menjadi kurang penting.¹⁰ Sumber dari *soft-power* itu sendiri terdapat tiga yang utama, yakni budaya (*culture*), nilai politik (*political values*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*).

Budaya memiliki daya tarik dan kemampuan asimilasi, artinya budaya dapat memberikan pemikiran dan nilai terhadap subjek, sehingga memiliki persepsi yang sama.¹¹ Dalam budaya, Nye membagi menjadi dua kelas, yaitu budaya kelas tinggi (*high culture*) dan kelas budaya populer (*popular culture*). Budaya kelas tinggi dapat membuka sisi keindahannya terhadap orang-orang dan dapat membuat mereka takluk secara emosional. Sedangkan budaya populer memiliki daya penetrasi yang kuat dan telah ada di seluruh dunia. Budaya populer yang ada di suatu negara dapat memperlancar negara untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara. Sebagai sebuah contoh, budaya populer Amerika telah memiliki pengaruh di berbagai penjuru dunia melalui NIKE, McDonald, dan Hollywood yang semuanya memengaruhi gaya hidup maupun hobi.¹² Hal ini disebabkan karena adanya penetrasi budaya populer yang dilakukan secara terus menerus untuk mempromosikan budaya dan ideologi Amerika. Sehingga, nilai

dan psikologi populer yang ada di negara lain mendapatkan pengaruh secara halus dengan cara yang beragam, seperti terintegrasi dengan budaya asli.¹³

Nilai politik merupakan salah satu komponen yang utama dalam suatu sistem, di mana suatu negara dianggap tidak terlalu kuat jika sistem ideologis mereka lemah. Sistem ini bergantung pada daya tarik nilai-nilai yang merupakan komponen dari *soft-power*. Ketika nilai politik suatu negara bisa membuat negara tertarik melalui inovasi yang dilakukan secara terus-menerus, maka suatu negara dapat memiliki posisi yang kuat dalam hubungan internasional serta pemenuhan kepentingan nasional dapat lebih mudah tercapai.¹⁴

Kebijakan suatu negara baik kebijakan dalam negeri ataupun luar negeri merupakan hasil dari pengimplementasian nilai-nilai politik yang ada dalam suatu negara. Masyarakat akan lebih merasakan nilai-nilai politik yang ada melalui kebijakan yang telah dibentuk. Kebijakan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan waktunya, yakni kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua macam kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah suatu negara berdasarkan berbagai latar belakang.¹⁵ Pemerintah suatu negara melalui kebijakan luar negerinya dapat memengaruhi status dan popularitas mereka dalam lingkungan internasional serta lingkungan domestik.¹⁶

Ketiga sumber tersebut telah membuat kekuatan antarnegara di dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan masalah internasional menjadi semakin kompleks dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam percaturan internasional. Nye berpendapat bahwa *soft-power* menjadi sebuah kemampuan yang dapat merealisasikan tujuan ataupun kepentingan nasional melalui

10 Joseph S. Nye, "Soft Power," *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153-171.

11 Li Lin dan Leng Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education," *Humanities and Social Sciences* 5, no. 2. (Maret 2017): 69-74.

12 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

13 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

14 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

15 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

16 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

hal yang lebih menarik dibandingkan dengan tindakan melalui kekerasan, seperti perang, invasi, ataupun yang lainnya.

Sekuritisasi

Sekuritisasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk turunan dari teori konstruktivisme dimana subyek akan membangun sebuah pandangan terhadap sebuah obyek yang mana obyek ini kemudian dianggap sebagai ancaman dan akhirnya diperlukanlah sebuah aksi untuk mencegah ancaman yang dibawanya. Sekuritisasi ini adalah bentuk ekstrim dari politisasi¹⁷ karena menggunakan bermacam cara dan sarana untuk menghindari ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional sebuah negara. Sekuritisasi ini tidak hanya mengacu pada aspek militer saja, namun juga masalah-masalah sosial lainnya yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Sebagai contoh sebuah negara mempunyai masalah lingkungan, maka dari itu sebuah negara dengan melewati beberapa proses menyatakan kepada masyarakat bahwasanya isu lingkungan ini dapat mengancam keberlangsungan kegiatan kenegaraan sehingga negara harus melakukan beberapa tindakan agar permasalahan ini dapat ditanggulangi.

Adapun komponen-komponen dalam Teori Sekuritisasi ini yaitu:¹⁸ (a) *Agent*, adalah pihak yang menyatakan perlunya tindakan, langkah dan pernyataan sekuritisasi; (b) *An existential threat*, adalah sebuah obyek yang sudah diidentifikasi sebagai ancaman potensial; (c) *A referent object*, adalah objek yang harus dilindungi dari potensi ancaman yang sebelumnya sudah diidentifikasi; dan (d) *An audience*, ialah target dari tindakan sekuritisasi yang harus dibujuk agar dapat menerima isu yang diangkat menjadi sebuah ancaman. *Audience* ini bisa disejajarkan oleh masyarakat dari sebuah Negara.

17 Barry Buzan, "A New Framework for Analysis", (London: Lynne Rienner Publishers Inc, 1998)

18 Buzan, "A New Framework for Analysis."

Maka dari itu bisa dikatakan bahwasannya teori sekuritisasi ini tidak berpaku pada militer saja. Namun isu-isu yang tadinya tidak mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah bisa saja menjadi ancaman jika negara menyatakan objek tersebut dapat mengganggu keamanan nasional.

Kebijakan dan Strategi Denmark di Bidang Lingkungan Hidup

Denmark merupakan salah satu negara Nordik yang berada di Eropa bagian Utara yang dinobatkan sebagai salah satu negara pengolah limbah menjadi energi terbaik di dunia. Sejak tahun 1988, Denmark dihadapkan pada masalah pemanasan global yang mana membuat permukaan air laut Denmark mengalami kenaikan sebagai akibat mencairnya es di Kutub Utara. Tidak hanya kenaikan permukaan air laut, temperatur udara yang ada di Denmark juga mengalami kenaikan sebesar 1,5°C. Suhu rata-rata ketika musim dingin menjadi lebih hangat daripada 2°C dan suhu rata-rata selama musim panas sebesar 16°C.¹⁹ Pada tanggal 4 Januari 2017, Denmark terkena musibah banjir akibat kenaikan permukaan laut. Permukaan laut tersebut naik hingga 177 cm di atas permukaan laut di wilayah selatan Denmark dan 157 cm di sebelah selatan Kopenhagen. Menurut Carlo Sørensen, profesor iklim dan ekonomi di *Technical University of Denmark*, permukaan laut Denmark akan naik hingga 70 cm pada tahun 2100 sehingga banjir akan lebih sering terjadi daripada tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini tentunya mengancam keamanan dan keselamatan rakyat Denmark karena keadaan tersebut menimbulkan berbagai masalah kesehatan, ekonomi maupun sosial. Perlu diketahui bahwa Denmark merupakan sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*),

19 Climate Change, "Denmark," *Climate Change Post*, 23 Oktober 2016, diakses 26 Desember 2017, <https://www.climatechange.org/denmark/climate-change/>

yakni Denmark mengambil peran yang sangat penting untuk menyediakan layanan sosial yang layak bagi rakyatnya.

Pemerintah Denmark kemudian memberlakukan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global yang dilakukan oleh Kementerian Energi, Bangunan dan Iklim. Ada 3 aspek utama yang dilakukan oleh Kementerian Energi, Bangunan dan Iklim untuk mengurangi efek pemanasan global,²⁰ yaitu: *pertama*, kampanye informasi melalui pembuatan website yang dioperasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; *Kedua*, Strategi penelitian, melalui pembentukan badan koordinasi untuk memastikan perubahan iklim yang terjadi di Denmark. Unit koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah Denmark memiliki tugas untuk melakukan penelitian adaptasi, menghimpun data, meneliti mengenai dampak dari iklim, serta melakukan penelitian lain yang relevan dengan adaptasi iklim. Selain itu, unit ini juga bertugas untuk mengoordinasikan dan memelihara tujuan penelitian yang ada dalam adaptasi iklim di Denmark yang dipandu oleh penasehat teknis yang terdiri dari peneliti Denmark dan internasional.²¹ Proyek penelitian adaptasi ini mencakup studi kebutuhan adaptasi dalam arsitektur; melihat pengaruh dinamika ekologis dan perubahan iklim terhadap lingkungan laut di perairan Denmark; penilaian risiko berdasarkan evaluasi statistik curah hujan ekstrim, gelombang badai, dan ketinggian gelombang ekstrem; dan partisipasi dalam studi internasional mengenai risiko banjir di jalan raya.²² Dan *ketiga*, membuat kerangka kerja organisasi, melalui pembentukan forum koordinasi antar otoritas publik.

20 E. Michael Goodsite., et al, "WHITE PAPER: Climate Change Adaptation in the Nordic Countries," *Stockholm Environment Institute*, 9 Maret 2013, diakses 26 Desember 2017, <https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/N-CMAEP-2013-White-Paper-Nordic-Countries-Adaptation.pdf>

21 Goodsite., et. al, "WHITE PAPER."

22 Goodsite., et. al, "WHITE PAPER."

Di samping itu, pemerintah Denmark juga melakukan penanggulangan banjir akibat dari pemanasan global dan juga berkomitmen untuk merubah sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah perubahan sumber pembangkit listrik dari batu bara ke energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi angin.²³

Denmark telah menjadi sebuah negara yang berhasil menciptakan pembangkit energi terbarukan yang terus meningkat sejak tahun 1980. Hingga tahun 2017, hampir 30% konsumsi energi Denmark menggunakan energi terbarukan.²⁴ Sumber energi terbarukan, terutama angin, telah menjadi penyumbang sumber energi listrik dalam negeri Denmark sebanyak 50%.²⁵ Turbin angin pembangkit listrik Denmark telah mampu menghasilkan energi listrik lebih banyak dari permintaan domestik dengan total lebih dari 5 GW (1,3 GW turbin berada di lepas pantai).²⁶ Denmark memiliki kondisi angin terbaik di Eropa dan didukung dengan kebijakan pemerintah pada saat krisis minyak melanda pada tahun 1970-an dengan bantuan penelitian untuk memanfaatkan energi tersebut.²⁷ Tahun 2015, tenaga angin telah memberikan kontribusi sebesar 42% dari produksi listrik di Denmark.²⁸

23 Nezar Patria, "Indonesia, Denmark to cooperate in clean energy," *The Jakarta Post*, 24 Mei 2018, diakses 23 Februari 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/24/indonesia-denmark-to-cooperate-in-clean-energy.html>

24 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU with Indonesian Energy Company," *My News Desk*, 29 November 2017, diakses 16 Desember 2017, <http://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/news/denmark-signs-mou-with-indonesian-energy-company-281737>

25 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU."

26 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU."

27 Benjamin K. Sovacool, "Energy policymaking in Denmark: Implications for global energy," *Energy Policy* 61, 2013: 829-839.

28 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kerja Sama Indonesia - Denmark, Jadikan Nyata, Sederhana, dan Workable," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 29 November 2017, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kerja-sama-indonesia-denmark-jadikan-nyata-sederhana-dan-workable>

Tarif IPP Tenaga Angin di Denmark sebesar di bawah USD 4 sen/kWh untuk *onshore* dan di bawah USD 6 sen/kWh untuk *offshore*.²⁹ Sejak tahun 1990-an, Denmark telah berhasil meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) sebanyak 44% dengan konsumsi energi telah turun sebanyak 8% dan emisi karbon yang telah disesuaikan sebesar 36%.³⁰

Tantangan *Green Realism* Denmark

Lars Løkke Rasmussen merupakan Perdana Menteri Denmark yang menjabat sejak Juni 2015. Ia merupakan seorang politikus yang berasal dari partai minoritas di Denmark yaitu Partai Liberal Venstre yang ia sendiri merupakan pemimpin partai tersebut. Sejak terpilih menjadi Perdana Menteri Denmark, Rasmussen mulai mengembangkan komitmennya terhadap perubahan iklim di Denmark melalui kebijakan mengenai iklim dan energi. Kebijakan-kebijakan tersebut dibangun dengan dasar *green realism*. *Green realism* merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa ekologi dalam kehidupan memiliki hubungan satu sama lain, yaitu aktivitas yang dilakukan manusia dapat memengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya dan berdampak hingga melewati batas-batas negara. Rasmussen menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi, semakin luasnya lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan untuk generasi mendatang akan mendapatkan tingkat lingkungan yang sama seperti saat ini. Dengan demikian, pemerintah menginginkan adanya “*more environment for less money*”.³¹

Pendekatan ini juga merubah kebijakan pemerintah mengenai energi terbarukan,

29 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kerja Sama Indonesia-Denmark.”

30 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kerja Sama Indonesia-Denmark.”

31 Helene Dyrhaug, “Green realism – An assessment of the Danish government’s climate & energy policy,” UACES, 26 November 2015, diakses 27 Desember 2017, <http://eutrack.ideason europe.eu/2015/11/16/green-realism-assessment-danish-governments-climate-energy-policy/>

yakni dari tenaga angin ke alternatif sumber daya lainnya. Akan tetapi terdapat beberapa kontroversi dalam pemerintah Denmark ketika akan melaksanakan kebijakan ini, yakni mengenai masalah anggaran. Pemerintah berencana untuk memotong anggaran di semua tingkat dan bidang kebijakan, seperti budaya, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pemotongan belanja ini tentunya sulit untuk mendukung transisi ekonomi hijau ini. Pertentangan salah satunya datang dari mantan Menteri Perubahan Iklim Denmark dan Mantan Komisaris Uni Eropa untuk Aksi Perubahan Iklim, Connie Hedegaard.³² Jika Rasmussen ingin kebijakannya disetujui, maka ia harus mendapatkan dukungan dari tiga partai di parlemen, yaitu *Danish People’s Party*, *Liberal Alliance*, dan *Conservative Party*. Dukungan kepada Rasmussen yang paling terlihat dari ketiga partai tersebut adalah dari *Conservative Party*. Sehingga untuk mendapatkan dukungan yang banyak, Rasmussen harus memberikan beberapa insentif kepada mereka melalui anggaran belanja yang lebih kepada mereka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan keringanan hambatan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Denmark meskipun terdapat pemotongan rancangan anggaran dana.

Danish International Development Agency (DANIDA)

Sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Denmark dari pengurangan dampak pemanasan global, pemerintah Denmark tidak hanya memberlakukan beberapa kebijakan di dalam negeri saja. Namun, Denmark juga mencanangkan beberapa inisiasi dalam skala Internasional untuk terus mengurangi dampak pemanasan global terhadap kedaulatan negaranya. Salah satu inisiasi yang dicanangkan Denmark adalah DANIDA.

32 Dyrhaug, “Green realism.”

DANIDA adalah singkatan dari *Danish International Development Agency*. DANIDA adalah sebuah program kerja yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan negara-negara berkembang di berbagai kawasan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Denmark melalui DANIDA mayoritas tertuju pada Afrika. Alasan mengapa lebih banyak bantuan ditujukan ke Afrika karena masih banyak permasalahan di Afrika yang kurang mendapatkan perhatian langsung dari dunia Internasional. Pada tahun 2016, Denmark menyalurkan total bantuan senilai DKK 15.96 Miliar atau setara dengan USD 2,34 miliar.³³

Selain di Afrika, DANIDA juga mengadakan kerja sama dengan berbagai negara lain di Asia, salah satunya adalah Indonesia sebagai sebuah negara dengan luas hutan yang besar. Akan tetapi, luas hutan yang ada di Indonesia berkurang tiap tahunnya akibat adanya deforestasi yang terus meningkat. Selama tahun 2014-2015, total deforestasi yang terjadi seluas 1,09 juta hektar.³⁴ Deforestasi terluas terjadi di Pulau Sumatera, yakni 519 ribu hektar atau 47,5 persen dari total deforestasi di Indonesia, diikuti Pulau Kalimantan sebesar 34,3 persen.³⁵ Hal ini membuat Denmark khawatir karena dengan maraknya deforestasi di Indonesia maka laju pemanasan global akan meningkat. Dengan berkurangnya jumlah luas hutan yang ada di Indonesia, maka penyerapan karbon dioksida oleh hutan Indonesia juga akan menurun.

Dampak dari fenomena ini adalah terjadinya pemanasan global yang mana suhu rata-rata global akan naik. Maka dari itu, peningkatan suhu ini akan membuat wilayah Denmark terancam tenggelam karena es di wilayah kutub akan mencair.

Melihat keadaan yang semakin genting, Denmark melalui DANIDA mengadakan kerja sama dengan Indonesia di beberapa sektor, antara lain sebagai berikut:³⁶ (a) Program Budaya Denmark mendukung pemangku kepentingan utama Indonesia dalam upaya mereka untuk mengembangkan sektor seni dan budaya, di mana para pelaku budaya memiliki ruang dan kapasitas untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan sebagai wadah di mana seni berkontribusi pada saling pengertian dan kepercayaan; (b) Program Dukungan Lingkungan. Program ini mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan manajemen lingkungan dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sekarang dalam fase ketiga (ESP3); (c) Program Tata Pemerintahan yang Baik. Program ini mendukung Indonesia dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dan memerangi kejahatan transnasional.

Di antara ketiga poin utama kerja sama Indonesia dan Denmark tersebut, yang memiliki titik fokus lebih adalah kerja sama di bidang lingkungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah Denmark untuk bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 2005.³⁷ Rencana pembangunan yang dilakukan antara kedua pemerintah mulai dari tahun 2005 hingga 2025 menargetkan pada bidang

33 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "About DANIDA," *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2011, diakses 24 Februari 2019, <http://um.dk/en/danida-en/about-danida/>

34 Badan Pusat Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017," BPS, 2017, diakses 2 April 2019, <https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia/Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>

35 Badan Pusat Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup."

36 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "DANIDA in Indonesia," *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2017, diakses 25 Februari 2019, <http://indonesien.um.dk/en/danida-en/>

37 ESP3, "Program Dukungan Lingkungan," ESP3, 2019, diakses 25 Februari 2019, <http://www.esp3.org/index.php/id/>

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | % |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| Russia | | | | 41 | 165 | 191 | 59 | 21 | 351 | 54 | | 880 | 18.9% |
| South Korea | 2 | | 176 | 5 | 90 | | 120 | 18 | 182 | 121 | 3 | 715 | 15.3% |
| United States | 4 | 11 | 17 | 14 | | | 0 | 35 | 85 | 150 | 364 | 681 | 14.6% |
| Netherlands | | | 297 | 149 | 149 | | | | | 3 | | 597 | 12.8% |
| United Kingdom | | | | | | | | | | 541 | 24 | 565 | 12.1% |
| France | 13 | 30 | 46 | 21 | 16 | 33 | 29 | 21 | 10 | 16 | 33 | 267 | 5.7% |
| China | | 10 | 3 | 3 | | 2 | 8 | 69 | 78 | 39 | 33 | 244 | 5.2% |
| Spain | 10 | 10 | 10 | | | | | 24 | 47 | 35 | 24 | 161 | 3.5% |
| Germany (P) | 6 | | | | 1 | | 7 | 1 | 11 | 77 | 27 | 130 | 2.8% |
| Switzerland | | | | | | | | | | 30 | 90 | 120 | 2.6% |
| Brazil | | | | | | | | 18 | | 37 | 37 | 92 | 2.0% |
| Australia | | | | | | | | | 18 | 19 | 37 | 75 | 1.6% |
| Canada | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 34 | 0.7% |
| Italy | | | 16 | 4 | 4 | | | | | 8 | | 32 | 0.7% |
| Brunei | | | | | | | 24 | | | | | 24 | 0.5% |
| Poland | | | 8 | | 9 | | | | | | | 17 | 0.4% |
| Belgium | | | | | | | | | 13 | | | 13 | 0.3% |
| Denmark | | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 5 | 11 | 0.2% |
| Czech Republic | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0.0% |
| Israel | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.0% |
| Total | 36 | 61 | 577 | 239 | 436 | 225 | 250 | 218 | 802 | 1136 | 683 | 4661 | 100.0% |

Source: SIPRI Arms Transfer Database.

Gambar 1. Data Impor Perdagangan Senjata Indonesia (2005 - 2015)

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi bisnis, energi, keamanan pangan, inovasi budaya dan teknologi yang menunjukkan bahwa kerja sama ini menuntut atas adanya produk baru dan solusi yang sangat luas.³⁸ Perusahaan dan pemerintah Denmark dengan keahlian dan teknologi yang baik menghadapi beberapa tantangan dan tuntutan yang ada di Indonesia, khususnya sektor-sektor berikut:³⁹ teknologi bersih pada lingkungan, limbah, air, pertumbuhan hijau, energi terbarukan, dan efisiensi energi; industri dan teknologi pangan; desain dan gaya hidup; ilmu kesehatan dan kehidupan; kemaritiman; dan industri pertahanan.

Pada tahun periode tahun 2005 hingga 2015, Indonesia memiliki hubungan kerja sama pertahanan dan keamanan dalam

jual beli senjata dari Denmark.⁴⁰ Gambar 1 menunjukkan data impor perdagangan senjata yang dilakukan Indonesia, dihimpun oleh SIPRI Arms Transfer Database dalam Adi dan Achwan, yang dilakukan Indonesia tahun 2005-2015 dinyatakan dalam juta dollar Amerika dengan harga konstan (1990).⁴¹

DANIDA ini sendiri menjadi salah satu sumber *soft-power* seperti yang dikemukakan oleh Nye. Implementasi nilai-nilai politik yang dimiliki oleh Denmark tercermin melalui kebijakan luar negeri negara tersebut. Kerja sama lingkungan yang dilakukan antara Denmark dan Indonesia maupun dengan negara-negara berkembang lainnya tentunya akan memengaruhi status dan popularitas Denmark di bidang lingkungan dalam ranah internasional. Selain itu kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh Denmark, maupun negara-negara yang diajak bekerjasama,

38 Denmark in Indonesia, "About Business in Indonesia," Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 23 Januari 2018, diakses 15 April 2019, <http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/market-and-business-culture-in-indonesia/>

39 Denmark in Indonesia, "About Business in Indonesia."

40 Isbandi Rukminto Adi & Rochman Achwan, *Competition And Cooperation In Social And Political Sciences*. (Chennai: Taylor & Francis Group, 2018).

41 Adi dan Achwan, *Competition And Cooperation*.

akan lebih mudah tercapai melalui program kerja ini. Kebijakan luar negeri ini membuat kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Denmark menjadi legal. Secara langsung ataupun tidak langsung, negara yang berpartisipasi dalam program kerja ini akan mendapatkan pengaruh dari Denmark, baik pengaruh budaya, teknologi, ataupun yang lainnya. Misalnya dalam pengaruh teknologi, Indonesia secara tidak langsung akan mendapatkan transfer teknologi bersih yang dilakukan melalui investasi seperti PLTB yang dilakukan di Jeneponto.

Hubungan Bilateral Indonesia-Denmark

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kawasan hutan yang terbesar di dunia, namun deforestasi sebagai bentuk alih fungsi lahan juga yang tertinggi di dunia, yakni Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia. Terlebih, tingkat penduduk Indonesia juga terbesar di dunia dengan penggunaan kendaraan juga. Secara tidak langsung dengan tingginya laju deforestasi, Indonesia menjadi negara kelima yang menyumbang gas rumah kaca (GRK). Selama periode 1970-an, laju deforestasi di Indonesia mencapai 300 ribu hektare/tahun,⁴² kemudian pada periode 1990-an meningkat menjadi 1 juta hektare/tahun.⁴³ Berdasarkan data statistik Kementerian Kehutanan tahun 2011, pada periode 2000-2010 laju deforestasi yang terjadi di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare/tahun.⁴⁴ Kemudian, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi netto nasional selama periode Juli 2016-Juni 2017 adalah 479 ribu hektare.⁴⁵

42 Forest Watch Indonesia, "Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara," *FWI*, 2018, diakses 2 April 2019, http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf

43 Forest Watch Indonesia, "Deforestasi Tanpa Henti."

44 WWF, "Kehutanan," WWF, 31 Mei 2014, diakses 2 April 2019, https://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/

45 KLKH, "Angka Deforestasi Tahun 2016-2017 Menurun," *KLKH*, 29 Januari 2018, diakses 2

Melihat keadaan yang terjadi, pemerintah Indonesia kemudian membuat keputusan untuk berkomitmen mengurangi efek rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Pada tahun 2011, mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidatonya di Shangri-La Hotel Jakarta, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki prioritas untuk membangun dan mengurangi kemiskinan dengan tidak mengesampingkan masalah mengenai hutan. Hal ini disebabkan karena hutan tidak dapat terlepas dari mata pencaharian, ketahanan pangan, ketersediaan kayu dan bahan bakar. Percepatan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan mengintensifkan upaya untuk mengurangi emisi gas, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan eksploitasi kehutanan.⁴⁶ Indonesia harus menyeimbangkan tujuan lingkungan dan sosial dengan ekonomi yang berkembang berdasarkan sumber daya alam dan kepentingan perusahaan.⁴⁷ Saat ini, Jokowi telah mengagendakan sembilan kebijakan dalam program Nawacita yang salah satu dari agenda tersebut merupakan kedaulatan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Keadaan tersebut secara tidak langsung memiliki kesamaan pandangan dengan Rasmussen, Denmark mempunyai kemungkinan untuk mengadakan kerja sama dalam bidang ekonomi-lingkungan. Sebelumnya, Denmark telah menandatangani nota kesepahaman mengenai bidang maritim, budaya, energi, dan transportasi pada 22 Oktober 2015. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh

April 2019, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1025

46 Cifor, "Speech by President Susilo Bambang Yudhoyono: Forests Indonesia Conference: Alternative Futures to Meet Demands for Food, Fibre, Fuel and Redd+," *Cifor*, 27 September 2011, diakses 31 Maret 2019, http://www.cifor.org/fileadmin/fileupload/media-release/27_Sep_SBY_Speech.pdf

47 World Resources Institute, "Forests and Landscapes in Indonesia," *World Resources Institute*, 9 Oktober 2013, diakses 27 Desember 2017, <https://www.wri.org/our-work/project/forests-and-landscapes-indonesia>

Menteri Energi, Bangunan dan Iklim, Lars Christian Lilleholt, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Kesepakatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kunjungan diplomatik pertama sejak 1950 yang dilakukan oleh Ratu Margrethe II dengan Pangeran Consort Henrik pada 21-24 Oktober 2015.⁴⁸

Kunjungan diplomatik kedua dilakukan kembali oleh Rasmussen sebagai Perdana Menteri Denmark di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa, 28 November 2017. Hal ini dapat dianalisis bahwa kunjungan sebelumnya belum mencapai salah satu kepentingan nasional dari pemerintah Denmark sehingga membutuhkan pembicaraan lebih lanjut melalui kunjungan diplomatik selanjutnya. Bahkan kunjungan tersebut dilakukan oleh kepala pemerintahan. Pertemuan ini dinamakan *summit diplomacy* yakni pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin negara yang berkumpul di suatu tempat untuk membahas suatu permasalahan yang kemudian kedua negara saling berkomitmen untuk mengusahakan tercapainya sebuah tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak. Pertemuan tersebut merupakan sebuah bentuk dari *soft-power diplomacy* karena Rasmussen bertemu dengan cara yang damai dan tidak menunjukkan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kunjungan kedua Denmark ke Indonesia menghasilkan penandatanganan kesepakatan bilateral untuk 2017-2020 sebagai tindak lanjut dari *Innovative Partnership Agreement* yang ditandatangani ketika Ratu Margrethe II berkunjung. Kesepakatan tersebut berisi mengenai peningkatan kerja sama maritim, seperti memerangi penangkapan ikan ilegal, meningkatkan kerja sama lingkungan yang

melibatkan proyek pelestarian hutan di Jambi, dan konservasi energi terbarukan jangka panjang. Selain itu, Indonesia sepakat untuk mengubah limbah menjadi energi seperti Denmark di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Solo. Kemudian pada tanggal 29 November 2017, Indonesia melalui PLN menandatangani nota kesepahaman untuk pengelolaan energi masa depan di Indonesia. Denmark menginginkan Indonesia untuk mencapai target mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 melalui pengurangan konsumsi batu bara dalam negeri.⁴⁹ Selain itu, Denmark juga sepakat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia untuk menciptakan energi baru dengan tarif listrik yang lebih murah serta mendapatkan keuntungan melalui penanaman investasi tersebut. Hal ini tentunya mendukung proyek Joko Widodo mengenai 35.000 MW.

Pada bulan Mei 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan menteri Kerja sama Pembangunan Denmark, Ulla Tornaes, meluncurkan Peta Potensi Energi Angin Indonesia untuk menentukan wilayah yang berpotensi menjadi wilayah PLTB.⁵⁰ Selain meluncurkan peta potensi energi, pemerintah Indonesia dan Denmark juga meluncurkan buku "*Integration of Wind Energy in Power System*" yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk membuat kebijakan dan pelaksana dalam mengintegrasikan energi listrik yang

48 Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Sekilas Info tentang Denmark," *Kementerian Luar Negeri Indonesia*, 2017, diakses 27 Desember 2017, <https://www.kemlu.go.id/copenhagen/id/Pages/Denmark.aspx>

49 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU with Indonesian Energy Company," *My News Desk*, 29 November 2017, diakses 16 Desember 2017, <http://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/news/denmark-signs-mou-with-indonesian-energy-company-281737>

50 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kaleidoskop 2017: Langkah Nyata Sektor ESDM dalam Mewujudkan Energi Berkeadilan (Bagian 2/4)," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 2 Januari 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>

di produksi PLTB ke dalam sistem jaringan listrik PT. PLN dengan berdasar dengan yang telah diterapkan oleh pemerintah Denmark.⁵¹ Selanjutnya sebagai tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri Denmark, pemerintah Indonesia mengadakan *Clean Technology Roundtable Discussion* di Hotel Raffles, Jakarta.⁵² Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap target bauran energi dari EBT sebesar 23% di tahun 2025.⁵³

Denmark memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang diajak bekerja sama dalam bidang lingkungan hidup karena Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pernyataan ini dikeluarkan menurut penelitian oleh Universitas Georgia di Amerika Serikat. Sampah tersebut kebanyakan berupa sampah plastik yang susah terurai secara alami yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.⁵⁴ Pemanasan global tersebut akan menyebabkan es di Kutub Utara akan cepat mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut di negara-negara sekitar Kutub Utara, salah satunya adalah Denmark. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman kedaulatan Denmark. Sehingga, Denmark secara tidak langsung menekan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

Selain menginginkan pelestarian lingkungan, dengan Indonesia ikut berpartisipasi dalam perjanjian tersebut, investasi Denmark di Indonesia dalam hal jual-beli listrik seperti *green realism* yang diinginkan oleh Rasmussen akan mudah tercapai.

Salah satu bentuk realisasi dari perjanjian yang terjalin adalah pembangunan *Wind Farm Jeneponto I* dirancang untuk memiliki kapasitas 72 MW yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2019.⁵⁵ Pada tanggal 19 September 2017, perwakilan terkemuka dari Equis dan PT. PLN menandatangani *Power Purchase Agreement (PPA)* di Kopenhagen di hadapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan Lars Christian Lilleholt serta CEO Vestas Anders Runevard PPA untuk *Tolo Wind Farm* adalah yang pertama untuk Equis di Indonesia dan PPA pertama untuk PT. PLN di bidang angin.⁵⁶ Vestas Anders Runevard merupakan produsen turbin angin yang berbasis di Aarhus, Denmark. Vestas telah melakukan desain, pembuatan, pemasangan, dan servis turbin angin di seluruh dunia dengan kapasitas tenaga angin lebih dari 76 GW di 75 negara dengan 63 GW turbin angin yang sedang beroperasi.⁵⁷ Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kualitas angin di Jeneponto merupakan salah satu yang terbaik di dunia.⁵⁸ Dengan demikian Denmark dengan kemajuan teknologinya akan lebih mudah mengeksplorasi angin-angin yang ada di Indonesia untuk mendapatkan

51 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Indonesia - Denmark Luncurkan Peta Potensi Angin," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 3 Mei 2017, diakses 26 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/indonesia-denmark-luncurkan-peta-potensi-angin>

52 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kaleidoskop 2017: Langkah Nyata Sektor ESDM dalam Mewujudkan Energi Berkeadilan (Bagian 2/4)," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 2 Januari 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>

53 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kaleidoskop 2017."

54 BBC Indonesia, "Lautan Indonesia, penyumbang sampah terbesar kedua di dunia," *BBC Indonesia*, 12 Januari 2016, diakses 17 Desember 2017, http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2016/01/160111_sampah_jakarta

55 Andi Hajramurni, "Completion of Jeneponto Wind Farm accelerated to July", 5 April 2018, diakses 24 Februari 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/05/completion-of-jeneponto-wind-farm-accelerated-to-july.html>

56 Redaya Energy, "Equis and PT. PLN (Persero) Sign 60 MW Wind PPA". *Venaenergy*, 19 September 2016, diakses 25 Februari 2019, <https://www.venaenergy.com/content/4-newsroom/20160919-equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa/equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa.pdf>

57 Redaya Energy, "Equis and PT. PLN (Persero)."

58 LIPI, "LIPI Sebut Angin Jeneponto Terbaik di Dunia," *LIPI*, 30 September 2016, diakses 30 Desember 2017, <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-sebut-angin-jeneponto-terbaik-di-dunia/16471>

keuntungan dan membangun kesejahteraan rakyat Denmark maupun Indonesia ke arah yang lebih maju. Selain itu, hal ini juga akan berdampak dengan pengurangan penggunaan energi fosil untuk listrik di Indonesia.

Selain bekerjasama dalam bidang PLTB, pemerintah Denmark melalui DANIDA kembali mempertegas dan memperkuat komitmennya dengan mencanangkan bantuan ESP3 (*The Enviromental Support Programme*) Fase 3. Program ESP3 ini adalah kerja sama yang melibatkan pemerintahan Denmark dengan badan-badan pemerintahan Indonesia seperti Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Terbarukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya bantuan ESP3 ini pemerintah Denmark berusaha memfasilitasi perubahan kegiatan perekonomian Indonesia yang masih belum berorientasi pada lingkungan menjadi kegiatan perekonomian yang *Green* dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan sekitar.⁵⁹ Pada akhirnya dengan menaruh perhatian lebih pada aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan diharapkan bahwa permasalahan pemanasan global yang bersumber dari Indonesia dapat dicegah dan diperlambat sehingga ancaman naiknya permukaan laut yang dapat mengancam kedaulatan wilayah Denmark dapat dicegah dan diperlambat. Selama program ESP3 berjalan, pemerintah Denmark akan memberikan total dana bantuan sebesar DKK 270 Juta atau setara dengan Rp 600 Miliar.

Bentuk penjawantahan dari kerja sama lingkungan ini diwujudkan dalam peningkatan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan yaitu seperti pengolahan limbah, energi terbarukan, efisiensi energi dan sumber daya alam. Program ESP3 ini difokuskan di Jawa Tengah terlebih dahulu sebagai proyek percontohan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa proyek

yang dilaksanakan di luar Jawa Tengah. Ketika program-program yang ada dicanangkan di Jawa Tengah menuai hasil yang bagus maka, proyek-proyek tersebut akan diangkat menjadi proyek nasional. Tujuan akhir dari ESP3 ini adalah menciptakan sebuah kondisi dimana perekonomian Indonesia berorientasi pada aspek keberlanjutan dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin lama semakin memburuk.

Selama program ESP3 ini berjalan, terdapat beberapa proyek yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah Indonesia. Beberapa diantaranya adalah pengolahan sampah menjadi *Refused Derived Fuel* di Cilacap; pembangunan panel surya di Karimunjawa; dan, pembersihan pantai di Bali.

Pengolahan Sampah menjadi Refused Derived Fuel di Cilacap

Refuse Derived Fuel (RFS) adalah sebuah produk bahan bakar yang dihasilkan dari limbah domestik dan bisnis.⁶⁰ Namun limbah yang paling sering digunakan untuk memproduksi RFS adalah limbah plastik. Jika terdapat limbah-limbah yang tidak bisa terbakar seperti kaca dan baja maka limbah tersebut akan dipisahkan. Untuk mengurangi limbah plastik di Cilacap, maka PT. Holcim Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Denmark melalui program ESP3 nya. Fasilitas pengolahan sampah menjadi *Refused Derived Fuel* ini akan dibangun di TPA Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan lahan sebesar 1 milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.⁶¹ Menurut

59 ESP3, "Program Dukungan Lingkungan," ESP3, 2019, diakses 25 Februari 2019, <http://www.esp3.org/index.php/id/>

60 Clarity, "What is RDF &SRF?," Clarity, 2019, diakses 25 Februari 2019, <https://www.clarity.eu.com/home/waste-to-fuel-solutions/what-is-rdf-srf.php>

61 Arimbi Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pertama di Indonesia," *Kompas*, 27 Juli 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://properti.kompas.com/read/2017/07/27/073026221/cilacap-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-pertama-di-indonesia>

Bupati Kabupaten Cilacap Tatto Suwanto, fasilitas pengolahan ini membutuhkan biaya Rp 40 Miliar setiap lima tahun beserta biaya-biaya lain.⁶² Pemerintah Kabupaten Cilacap membuka kerja sama dengan pihak-pihak luar seperti masyarakat, swasta, dan luar. Karena proyek ini berorientasi pada keberlanjutan dan pemeliharaan lingkungan maka Pemerintah Denmark sesuai dengan poin kedua DANIDA yaitu menjaga lingkungan maka Pemerintah Denmark ikut turut serta dalam proyek RFS di Cilacap. Pemerintah Denmark sendiri melalui DANIDA telah menyatakan ketertarikan untuk membantu investasi di fasilitas tersebut sebesar 50%.⁶³ Denmark juga berkontribusi membiayai pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal.⁶⁴ Tujuan dari didirikannya fasilitas RFS ini adalah pabrik Holcim yang ada di Cilacap dapat menggunakan RFS sebagai bahan bakar alternatif menggantikan batu bara.⁶⁵

Jika dilihat dari tingkat ketertarikan pemerintah Denmark dalam pengadaan proyek fasilitas RFS ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Denmark sangat serius pada komitmennya untuk memperbaiki cara manajemen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Selain membantu dan mendukung Indonesia dalam merubah kegiatan perekonomiannya menjadi lebih berorientasi pada aspek-aspek lingkungan, Denmark juga memiliki kepentingan utama untuk memperlambat pemanasan global. Dengan didirikannya fasilitas RFS ini diharapkan

bahwa kegiatan pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar tradisional seperti batu bara bisa dialihkan sehingga polusi yang dihasilkan pabrik tersebut dapat berkurang dan laju pemanasan global dapat diperlambat.

Pembangunan Panel Surya di Karimunjawa

Selain membangun PLTB, Denmark juga melakukan pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kepulauan Karimunjawa. Pembangunan PLTS ini mencakup pulau Nyamuk, pulau Genting, dan pulau Parang.⁶⁶ Pemerintah Denmark melalui program ESP3 nya mendanai pengadaan panel surya sebesar Rp 14 miliar.⁶⁷ Dengan adanya dana yang cukup besar tersebut maka pemerintah Indonesia dan Denmark dapat mewujudkan proyek PLTS dengan total kapasitas energi sebesar 283 kWp. PLTS di pulau Parang akan dibangun dengan kapasitas 136 kWp, pulau Nyamuk sebesar 111 kWp, sedangkan pulau Genting akan dibangun PLTS berkapasitas 36 kWp.⁶⁸

Berkat dibangunnya PLTS di ketiga pulau tersebut, persediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dapat tercapai. Sebelum adanya proyek PLTS kerja sama pemerintah Denmark dan Indonesia, persediaan listrik di ketiga pulau menggunakan mesin diesel dan hanya berlangsung selama 6 jam saja. Bahkan persediaan listrik di ketiga pulau dapat menunjang aktivitas masyarakat selama 24 jam sehari. Tentu pengadaan PLTS ini saling menguntungkan pihak Indonesia dan

62 Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah."

63 Royal Danish Embassy, "Cilacap Regency Refuse Derived Fuel Project Financial Model Review," ESP3, 2015, diakses 25 Februari 2019, http://esp3.org/images/Library/PapersReports/14321-8_RDF_Project_FM_Review_Final_Report_2015-11-11.pdf

64 Arimbi Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pertama di Indonesia," *Kompas*, 27 Juli 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://properti.kompas.com/read/2017/07/27/073026221/cilacap-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-pertama-di-indonesia>

65 Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah."

66 Putri Aini Yasmin, "Denmark Bangun 'Kebun Matahari' Terangi Pulau Genting Karimunjawa," *Detik Finance*, 7 Agustus 2018, diakses 23 Februari 2019, <https://finance.detik.com/energi/d-4154577/denmark-bangun-kebun-matahari-terangi-pulau-genting-karimunjawa>

67 David Oliver Purba, "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan, Apa Dampaknya Bagi Rakyat?," *Kompas*, 24 Oktober 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/07040001/pembangunan-plts-karimunjawa-diresmikan-apa-dampaknya-bagi-rakyat->

68 Purba, "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan."

Denmark. Pasalnya pembangunan PLTS ini sesuai dengan keinginan presiden Joko Widodo yang ingin melepas ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga fosil⁶⁹ yang notabene merupakan salah satu penyumbang dari pemanasan global. Penggunaan PLTS yang ramah lingkungan ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 3.200 ton Co2 per tahun.⁷⁰ Sedangkan di pihak Denmark, pembangunan pembangkit listrik yang terbaru ini sesuai dengan kepentingan awal mereka yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya di Indonesia agar tetap bersih dan berkelanjutan sehingga tingkat pemanasan global tidak berdampak secara signifikan pada Negara Denmark.

Pembersihan Pantai di Bali

Selain ketiga proyek yang sedang berjalan tersebut, Denmark dan Indonesia juga menyelenggarakan berbagai acara terkait dengan isu lingkungan hidup. Salah satunya adalah diselenggarakannya rangkaian pra-acara menjelang *Our Ocean Conference* (OOC) 2018 pada tanggal 28 Oktober 2018. Pra-acara ini berupa Pembersihan Pantai (*Beach Clean-up*) di Pantai Kuta, Bali yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Denmark bekerjasama dengan Pusat Studi Asia Tenggara, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.⁷¹ Acara ini merupakan salah satu bentuk kampanye melawan polusi plastik di laut. Kegiatan yang ada dalam acara ini berupa

69 Sandro Gatra, "Presiden Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung Pada Energi Fosil," *Kompas*, 25 Februari 2019, diakses 25 Februari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/14043791/presiden-jokowi-tak-ingin-listrik-tergantung-pada-energi-fosil>

70 David Oliver Purba, "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan, Apa Dampaknya Bagi Rakyat?," *Kompas*, 24 Oktober 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/07040001/pembangunan-plts-karimunjawa-diresmikan-apa-dampaknya-bagi-rakyat>

71 ESP3, "OOC 2018: Beach Clean Up," ESP3, 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esp3.org/index.php/en/news-and-events/341-ooc-2018-beach-clean-up>

pembersihan Pantai Kuta dari polusi pantai, seperti rumput laut, gelas, jarum, plastik dan lain-lain. Sebelum melakukan pembersihan pantai, kegiatan diawali dengan melakukan pelepasan sekitar seribu tukik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beserta duta besar dari negara-negara sahabat.⁷² Rangkaian pra-acara yang kemudian dilanjutkan dengan *workshop* dengan tema "*Plastic Waste Recycling and Circular Economy*" pada 29 Oktober 2018.⁷³ Pra-acara ini dapat dikatakan sebagai sebuah dukungan Denmark kepada Indonesia untuk mengelola limbah sampah. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepentingan nasional Denmark dari ancaman pemanasan global yang telah menyebabkan permukaan air laut Denmark mengalami kenaikan sehingga menyebabkan munculnya ancaman banjir yang lebih sering di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Denmark dan Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama sejak 1950 dengan bidang kerja sama yang beragam seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Namun, kunjungan diplomatik pertama baru dilakukan pada tahun 2015 melalui kedatangan Ratu Margrethe II bersama dengan Pangeran Consort Henrik. Pemerintah Denmark beranggapan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan potensi sumber daya yang besar. Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepahaman antar kedua negara untuk bekerja sama dalam bidang maritim, budaya, energi, dan transportasi pada 22 Oktober 2015 yang ditandatangani

72 Retno M, "Menlu RI : Laut Bukan Tong Sampah", RRI, 28 Oktober 2018, diakses 26 Februari 2019, http://rri.co.id/post/berita/590454/nasional/menlu_ri_laut_bukan_tong_sampah_besar.html#

73 ESP3, "OOC 2018: Beach Clean Up," ESP3, 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esp3.org/index.php/en/news-and-events/341-ooc-2018-beach-clean-up>

Lars Christian Lilleholt, dengan Menteri Energi dan Sudirman Said. Terdapat tindak lanjut dari penandatanganan ini, yakni pembentukan kerangka kerja sama *Strategic Sector Cooperation* (SSC) yang berlangsung pada Januari 2016. Kemudian pada bulan November 2017, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, datang berkunjung ke Indonesia dengan membawakan piringan hitam Metallica. Banyaknya tindak lanjut dari kunjungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Denmark memiliki tekad kuat untuk dapat bekerjasama dengan Indonesia.

Negara akan mengusahakan kepentingan negaranya melalui berbagai cara agar tercapai. Saat ini, pendekatan suatu negara terhadap negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tidak menggunakan cara kekerasan ataupun perang, melainkan dekat pendekatan yang lebih 'halus' atau melalui *soft-power diplomacy*. Pemberian hadiah tersebut merupakan sebuah sarana untuk melancarkan diplomasi Denmark agar kepentingan nasionalnya terpenuhi. Rasmussen merupakan perdana menteri yang sangat memerhatikan lingkungan dengan landasan green realism menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan lingkungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan selama beberapa dekade terakhir Denmark dihadapkan pada masalah pemanasan global. Melalui kunjungan kedua tersebut, antara Indonesia dengan Denmark telah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama peningkatan kerja sama maritim, seperti memerangi penangkapan ikan ilegal, meningkatkan kerja sama lingkungan yang melibatkan proyek pelestarian hutan di Jambi, dan konservasi energi terbarukan jangka panjang melalui pembangkit listrik tenaga angin. Selain bekerjasama dalam sektor PLTB, Denmark dan Indonesia juga sepakat untuk bekerjasama di bidang PLTS serta pengolahan sampah.

Hal yang didapatkan oleh Indonesia dari kerja sama bilateral yang terjalin dengan Denmark adalah Indonesia mendapatkan transfer ilmu dan teknologi dari investasi yang ditanamkan dari investor asal Denmark. Jumlah energi fosil yang ada di dunia dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil energi fosil yang sama. Hal ini kemudian memerlukan adanya energi baru yang lebih ramah lingkungan dan mudah untuk diperbarui. Kemajuan Denmark dalam teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia beserta masyarakatnya untuk lebih termotivasi melakukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi ramah lingkungan, mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor lingkungan hidup, seperti lautan, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto., dan Rochman Achwan. *Competition And Cooperation In Social And Political Sciences*. Chennai: Taylor & Francis Group, 2018.
- Arash Heydarian Pashakhanlou, "Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism: A Re-examination of Hans Morgenthau's and Kenneth Waltz's Theories of International Relations". *E-international relations student online article*, 23 Juli 2009. Diakses 3 Mei 2019. <https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/>
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017." *Badan Pusat Statistik*, 2017. Diakses 2 April 2019. <https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia/Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>

- Barry Buzan, *A New Framework for Analysis*, (London: Lynne Rienner Publishers Inc, 1998)
- BBC Indonesia. "Ini sangat keren': Jokowi menerima piringan hitam Metallica 'Master Of Puppets'". *BBC Indonesia*, 30 November 2017. Diakses 7 Desember 2017. <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial42167699>
- BBCIndonesia. "LautanIndonesia, penyumbang sampah terbesar kedua di dunia". *BBC Indonesia*, 12 Januari 2016. Diakses 27 Desember 2017. http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2016/01/160111_sampah_jakarta
- Clarity, "What is RDF &SRF?." *Clarity*, 2019. Diakses 25 Februari 2019. <https://www.clarity.eu.com/home/waste-to-fuel-solutions/what-is-rdf-srf.php>
- Climate Change. Denmark. *Climate Change Post*, 23 Oktober 2016. Diakses 26 Desember 2017. <https://www.climatechangepost.com/denmark/climate-change/>
- Danish Energy Agency. "Denmark signs MoU with Indonesian Energy Company." *My News Desk*, 29 November 2017. Diakses 16 Desember, 2017. <http://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/news/denmark-signs-mou-with-indonesian-energy-company-281737>
- Danish Energy Agency. "The Danish Energy Model: Innovative, Efficient and Sustainable." *Danish Energy Agency*, 2014. Diakses 24 Februari, 2019. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/the_danish_energy_model.pdf
- Denmark in Indonesia. "About Business in Indonesia", *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 23 Januari 2018. Diakses 15 April 2019, <http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/market-and-business-culture-in-indonesia/>
- Dyrhaug, Helene. "Green realism – An assessment of the Danish government's climate & energy policy." *UACES*, 16 November 2015. Diakses 27 Desember, 2017. <http://eutrack.ideasonerurope.eu/2015/11/16/green-realism-assessment-danish-governments-climate-energy-policy/>
- ESP3. "OOC 2018: Beach Clean Up." *ESP3*, 29 Oktober 2018. Diakses Februari 25, 2019. <https://www.esp3.org/index.php/en/news-and-events/341-ooc-2018-beach-clean-up>
- ESP3. "Program Dukungan Lingkungan. 2019." *ESP3*, 2019. Diakses 25 Februari 2019. <http://www.esp3.org/index.php/id/>
- Gatra, Sandro. "Presiden Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung Pada Energi Fosil." *Kompas*, 25 Februari 2019. Diakses 25 Februari 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/14043791/presiden-jokowi-tak-ingin-listrik-tergantung-pada-energi-fosil>
- Goodsite, E. Michael, et al. "WHITE PAPER: Climate Change Adaptation in the Nordic Countries". *Stockholm Environment Institute*, 9 Maret 2013. Diakses 26 Desember 2017. <https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/N-CMAEP-2013-White-Paper-Nordic-Countries-Adaptation.pdf>
- Jackson, Robert., dan Georg Sørensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hajramurni, Andi. "Completion of Jeneponto Wind Farm accelerated to July". *The Jakarta Post*, 5 April 2018. Diakses 24 Februari 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/05/completion-of-jeneponto-wind-farm-accelerated-to-july.html>
- Hans J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, *Politik Antarbangsa*, Penerjemah: A.M Fatwan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990).

- Kami, Indah Mutiara. "Ungkapan Syukur Jokowi Setelah Tebus Vinyl Metallica Rp 11 Juta." *Detik News*, 21 Februari 2018. Diakses 23 Februari 2019. <https://news.detik.com/berita/d-3877522/ungkapan-syukur-jokowi-setelah-tebus-vinyl-metallica-rp-11-juta>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Indonesia - Denmark Luncurkan Peta Potensi Angin." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 3 Mei 2017. Diakses 26 Februari 2019. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/indonesia-denmark-luncurkan-peta-potensi-angin>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Kaleidoskop 2017: Langkah Nyata Sektor ESDM dalam Mewujudkan Energi Berkeadilan (Bagian 2/4)." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 2 Januari 2018. Diakses 25 Februari 2019. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Kerja Sama Indonesia - Denmark, Jadikan Nyata, Sederhana, dan Workable." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 29 November 2017. Diakses 26 Februari 2019. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. "Sekilas Info Tentang Denmark." *Kementerian Luar Negeri Indonesia*, 2017. Diakses 27 Desember 2017. <https://www.kemlu.go.id/copenhagen/id/Pages/Denmark.aspx>
- Lidegaard, Martin, Mogens Jensen, dan Rasmus Helveg Petersen. "Indonesia-Denmark partnership: How to clear a 11,000 km divide". *The Jakarta Post*, 29 November 2014. Diakses 30 Desember 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/29/indonesia-denmark-partnership-how-clear-a-11000-km-divide.html>
- Lin, Li, dan Leng Hongtao. "Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education," *Humanities and Social Sciences* 5, no. 2. (Maret 2017): 69-74.
- LIPI. "LIPI Sebut Angin Jeneponto Terbaik di Dunia." *LIPI*, 30 September 2016. Diakses 30 Desember 2017. <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-sebut-angin-jeneponto-terbaik-di-dunia/16471>
- M, Retno. "Menlu RI : Laut Bukan Tong Sampah." *RRI*, 28 Oktober 2018. Diakses 26 Februari 2019. http://rri.co.id/post/berita/590454/nasional/menlu_ri_laut_bukan_tong_sampah_besar.html#
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. "About Danida". *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2011. Diakses 24 Februari 2019. <http://um.dk/en/danida-en/about-danida/>
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. "DANIDA in Indonesia." *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2017. Diakses 25 Februari 2019. <http://indonesien.um.dk/en/danida-en/>
- News Desk. "Danish PM surprises Jokowi with Metallica box set". *The Jakarta Post*, 28 November 2017. Diakses 9 Desember 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/28/danish-pm-surprises-jokowi-with-metallica-box-set.html>
- Nye, Joseph S. "Soft Power." *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153-171.

- Patria, Nezar. "Indonesia, Denmark to cooperate in clean energy." *The Jakarta Post*, 24 Mei 2018. Diakses 23 Februari 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/24/indonesia-denmark-to-cooperate-in-clean-energy.html>
- Parajuli, Ranjan. "Looking into the Danish energy system: Lesson to be learned". *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16. (2012): 2191-2199.
- Purba, David Oliver. "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan, Apa Dampaknya Bagi Rakyat?". *Kompas*, 24 Oktober 2017. Diakses 23 Februari 2019. <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/07040001/pembangunan-plts-karimunjawa-diresmikan-apa-dampaknya-bagi-rakyat>
- Ramadhani, Arimbi. "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pertama di Indonesia." *Kompas*, 27 Juli 2017. Diakses 23 Februari 2019. <https://properti.kompas.com/read/2017/07/27/073026221/cilacap-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-pertama-di-indonesia>
- Redaya Energi. "Equis and PT. PLN (Persero) Sign 60 MW Wind PPA." *Venaenergy*, 19 September 2016. Diakses 25 Februari 2019. <https://www.venaenergy.com/content/4-newsroom/20160919-equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa/equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa.pdf>
- Ristekdikti. "Denmark Berbicara Kerjasama Lebih Lanjut Dengan Indonesia". *Ristekdikti*, 28 April 2016. Diakses 27 Desember 2017. <https://ristekdikti.go.id/denmark-berbicara-kerjasama-lebih-lanjut-dengan-indonesia/>
- Ririhena, Yohanna. "Bright future seen for Indonesian-Danish relations." *The Jakarta Post*, 9 Oktober 2015. Diakses 31 Maret 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/09/bright-future-seen-indonesian-danish-relations.html>
- Royal Danish Embassy. "Cilacap Regency Refuse Derived Fuel Project Financial Model Review." *ESP3*, 2015. Diakses 25 Februari 2019. http://esp3.org/images/Library/PapersReports/14321-8-RDF_Project_FM_Review_Final_Report_2015-11-11.pdf
- Sheany. "Indonesia, Denmark Agree to Cooperate Waste Management Energy." *Jakarta Globe*, 28 November 2017. Diakses 7 Desember 2017. <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-denmark-agree-to-cooperate-on-waste-management-energy/>
- Sovacool, Benjamin K. "Energy policy making in Denmark: Implications for global energy." *Energy Policy* 61, (2013): 829-839.
- Tribun Jeneponto. "Menurut Orang Jerman Ini, Kualitas Angin Jeneponto Terbaik di Dunia." *Tribun Makassar*, 26 Agustus 2016. Diakses Desember 30, 2017. <http://makassar.tribunnews.com/2016/08/26/menurut-orang-jerman-ini-kualitas-angin-jeneponto-terbaik-di-dunia>
- W, Christian. "Flooding in Denmark Becoming the Norm." *CPH Post*, 5 Januari 2017. Diakses 28 Desember 2017. <http://cphpost.dk/news/flooding-in-denmark-becoming-the-norm.html>
- World Resources Institute. *Forests and Landscapes in Indonesia*. World Resources Institute, 9 Oktober 2013. Diakses 27 Desember 2017. <https://www.wri.org/our-work/project/forests-and-landscapes-indonesia>
- Yasmin, Putri Aini. "Denmark Bangun 'Kebun Matahari' Terangi Pulau Genting Karimunjawa." *Detik Finance*, 7 Agustus 2018. Diakses 23 Februari 2019. <https://finance.detik.com/energi/d-4154577/denmark-bangun-kebum-matahari-terangi-pulau-genting-karimunjawa>